

**TIPOLOGI PEMILIH ETNIS TIONGHOA PADA PEMILIHAN LEGISLATIF KOTA
TANJUNGPINANG TAHUN 2014**

(STUDI KASUS DI KELURAHAN TANJUNGPINANG KOTA)

NASKAH PUBLIKASI



OLEH

**ABU NAWAS
NIM. 110565201035**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG**

2015

Tipologi Pemilih Etnis Tionghoa pada Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang tahun 2014 (studi kasus di Kelurahan Tanjungpinang Kota)

Oleh
Abu Nawas

abstrak

Pemilihan umum merupakan mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Tingkat Heterogen dalam suatu masyarakat terdiri dari keanekaragaman suku dan budaya, kepercayaan/agama, tingkat pendidikan yang berbeda-beda, karakteristik yang berbeda-beda pada setiap pasangan calon, prestasi dan program kerja yang berbeda menjadikan persepsi tersendiri bagi pemilih etnis Tionghoa di Kelurahan Tanjungpinang Kota untuk menentukan pilihannya pada pemilihan umum legislatif Kota Tanjungpinang pada tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dengan format deskriptif yaitu menggunakan Skala Gutman untuk menganalisa data. Skala gutman di sini dipakai untuk melihat kecenderungan tipologi pemilih masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif Kota Tanjungpinang di Kelurahan Tanjungpinang Kota tahun 2014, apakah lebih dipengaruhi faktor Rasional, Kritis, Tradisional, Skeptis.

Setelah dilakukan penelitian terhadap perilaku pemilih masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Tanjungpinang Kota yaitu Pemilih Skeptis persentasenya 57% yang mendekati Skeptis, Pemilih Tradisional persentasenya 45% mendekati tidak Tradisional, Pemilih Kritis persentasenya 2% mendekati tidak kritis, Pemilih Rasional mendapatkan persentase 16% mendekati tidak Rasional, dari hasil persentase tersebut yang paling tinggi adalah pemilih Skeptis sebanyak 57%. Maka, dapat disimpulkan tipologi pemilih masyarakat etnis Tionghoa pada Pemilihan Umum Legislatif Kota Tanjungpinang tahun 2014 di Kelurahan Tanjungpinang Kota adalah Pemilih Skeptis dengan alasan karena masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Tanjungpinang Kota tidak menjadi simpatisan calon atau parpol, sebagian besar tidak mengetahui platform dan kebijakan parpol pengusung caleg yang mereka pilih, mempunyai keyakinan bahwa siapa pun dan partai apa pun yang memenangkan pemilu tidak akan membawa perubahan yang baik bagi kehidupan mereka.

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Tipologi Pemilih

Typology of Chinese Ethnic Voters in 2014 Tanjungpinang City Legislative General Election (Tanjungpinang City Sub-district Case Study)

By
Abu Nawas

Abstract

General election is a power circulation and succession mechanism. The degree of heterogeneity in society encompassing various ethnic and cultural, belief/religion, different levels of education, different characteristics from each pair of candidates and different achievements and programs have led to a different perception of Chinese ethnic voters in Tanjungpinang City Sub-district in the 2014 Tanjungpinang City Legislative General Election.

This research used quantitative method with descriptive format by using Gutman Scale to analyze data. The usage of Gutman Scale in this research is to find out the trend of voters' typology from the 2014 Tanjungpinang City Legislative General Election, specifically Chinese ethnic voters from Tanjungpinang City Sub-district, whether they are more influenced by rational, critical, traditional or skeptical.

The result of this research has shown that voting behavior of Chinese ethnic in Tanjungpinang City Sub-district is as follows: Skeptical Voters leaning to Skeptical factor are 57 %, Traditional Voters leaning to non-Traditional are 45%, Critical Voters leaning to non-critical are 2 %, Rational Voters leaning to non-Rational are 16 %. From those results, majority of the voters are Skeptical Voters with 57 %. Thus, it can be concluded that the typology of Chinese ethnic voters from the 2014 Tanjungpinang City Legislative General Election in Tanjungpinang City Sub-district are Skeptical Voters. The reason behind this is the majority of Chinese ethnic in Tanjungpinang City Sub-district are not supporters of candidates nor political parties. Majority of the voters do not know platform and policy of their voted candidate's party. They have a belief whoever candidate or party which win the general election will not bring any significant changes to their live.

Keywords: General Election, Voter Typology

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Etnis Tionghoa pada dasarnya masih mendominasi sektor perekonomian bisnis di Indonesia, kelompok etnis Tionghoa juga mempunyai pengaruh besar terhadap kemajuan perekonomian Indonesia. Konsep perilaku para pemilih etnis Tionghoa hakikatnya untuk mewujudkan dan meningkatkan standar hidup bangsa yang mencerminkan sifat kapitalisme dan materialisme yang dimiliki kandidat etnis Tionghoa dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Politisi etnis Tionghoa yang pernah menduduki jabatan di pemerintahan, baik pusat maupun daerah seperti Kwik Kian Gie, Alvin Lee pada masa pemerintahan Mega Wati dan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yakni Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dan Marie Elka Pangestu.

Bergulirnya reformasi tahun 2008 telah menjadi dasar terbentuknya sistem demokrasi yang terbuka dengan memangkas sistem demokrasi yang mengarah kepada sentralistis mutlak pada kepemimpinan masa orde baru. Kondisi ini berdampak luas pada berubahnya pola perpolitikan di Indonesia. Diberlakukannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian dirubah menjadi Undang-undang 32 tahun 2014 dan kemudian dirubah kembali menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah.

Melihat kembali pada masa orde baru sistem pemilihan kepada daerah menjadi hak prograssifnya DPRD baik itu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, pola pemilihan seperti ini dianggap telah memangkas kedaulatan rakyat, oleh karena itu di faska reformasi kewenangan memilih dikembalikan ke rakyat sebagai pemegang mandat tertinggi.

Munculnya reformasi dan bergantinya tampuk pemerintahan Indonesia menunjukkan perubahan signifikan terkait hak dan kebebasan masyarakat Tionghoa, pada tahun 2000 di masa kepemimpinan Presiden Abdurahman Wahid Inpres No.14 tahun 1967 dicabut dan diganti

dengan Kepres No.6 Tahun 2000 tentang pengakuan kebebasan hak masyarakat Tionghoa sebagai masyarakat yang mempunyai kebebasan berpolitik sebagaimana masyarakat pribumi di Indonesia. Dalam hal politik misalnya dengan bergulirnya kepres No.6 tahun 2000 ini, masyarakat Tionghoa lebih mendapat kebebasan berpolitik baik hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Paska orde baru juga, muncul beberapa Perundang-undangan baru untuk mencabut peraturan diskriminatif kepada etnis Tionghoa salah satunya adalah Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang ditetapkannya hari tahun baru Imlek sebagai hari libur Nasional. Era reformasi, etnis Tionghoa mulai menyerukan isu-isu lokal tentang penegakan HAM dan juga mulai masuk dan terlibat dalam kehidupan politik Indonesia salah satunya dengan sikap atau perilaku kelompok minoritas etnis Tionghoa dalam mengapresiasi perwakilannya sebagai kandidat pemilihan umum (Hoon, 2012:19)

Bentuk perilaku dan aspirasi yang ditunjukkan etnis Tionghoa mulanya masih pada taraf ikut berpartisipasi dengan memilih anggota legislatif dan Presiden dalam pemilihan umum. Perkembangan selanjutnya perilaku politik yang ditunjukkan etnis Tionghoa di Indonesia mulai terlihat dengan memberikan dukungan terhadap kandidat yang berasal dari etnis Tionghoa dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, terlihat banyak warga keturunan Tionghoa yang mendukung kandidatnya sebagai wakil rakyat, anggota pemerintahan, dan menteri-menteri dalam Kabinet pemerintahan era Reformasi.

Salah satunya terlihat di Kota Tanjungpinang, Pemilih Etnis Tionghoa itu sendiri menjadi suatu partisipasi politik dan mulai menunjukkan pilihan-pilihan politik yang sesuai dengan ideologinya sebagai kelompok minoritas. Politisi yang berasal dari etnis Tionghoa tidak terlepas dari bentuk sikap atau perilaku kelompok masyarakat etnis Tionghoa dalam memberikan dukungan terhadap Politisi etnis Tionghoa. Salah satu contoh bentuk dukungan politik yang diberikan oleh pemilih kepada saudara Bobby Jayanto mantan Ketua DPRD Kota

Tanjungpinang tahun 2004 yang munculnya dari ikatan pengusaha Indonesia Kota Tanjungpinang yang pada umumnya berbasis etnis Tionghoa.

Beragamnya etnis di Kota Tanjungpinang menyebabkan keragam pula adat dan kebiasaan masyarakat. Beberapa etnis memiliki perkumpulan tertentu yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan seperti etnis Melayu dengan Lembaga Adat Melayu (LAM), Sumatera Barat dengan istilah Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB), etnis Jawa dengan Keluarga Among Mitro dan etnis Tionghoa dengan istilah Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa Indonesia (PSMTI) atau dalam bahasa *Hokkien* (bahasa mandarin) dikenal dengan Lan danlain sebagainya.

Berdasarkan data pusat statistik Kota Tanjungpinang Tahun 2014 kondisi keagamaan yang dianut berbagai masyarakat khususnya di Kelurahan Tanjungpinang Kota dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.1
Jumlah penduduk menurut agama yang ada di Kelurahan Tanjungpinang Kota Tahun 2014

No	Agama	Jumlah Penduduk
1	Budha	6030 Orang
2	Islam	1071 Orang
3	Kristen Protestan	286 Orang
4	Katholik	113 Orang
5	Konghucu	23Orang
6	Hindu	5 Orang

Sumber: KantorKelurahan Tanjungpinang Kota tahun 2015.

Masyarakat etnis Tionghoa pada umumnya menganut agama Konghucu, Budha dan Protestan. Pemilu 2004, 2009 dan 2014 etnis Tionghoa mulai menampakkan dirinya dalam

perpolitikan di Kota Tanjungpinang, baik sebagai anggota perwakilan rakyat, maupun pakar politik. Keberhasilan etnis Tionghoa di dunia politik memberikan angin segar bagi iklim demokrasi khususnya di Kota Tanjungpinang.

Pemilihan umum yang dilaksanakan pada 9 April 2014 lalu di daerah pemilihan 1 yang terdiri dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Kecamatan Tanjungpinang Kota terdapat delapan (8) calon legislatif yang berasal dari Etnis Tionghoa, yakni Saudara Freddy, SE, MM, Simon Awantoko, Angel Chen SE, Fengky Fesinto, SH, MH, IR. Hartono, Kasimo, Kendi Agustin dan saudara Beni. Yang berhasil mendapatkan kursi legislatif dari etnis tersebut berjumlah tiga (3) orang, yakni: Fengki Fesinto, SH, MH, Beni, dan Simon Awantoko dengan jumlah suara yang signifikan, dan berdasarkan pengamatan yang dilakukan berkenaan dengan perilaku pemilih Etnis Tionghoa pada Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang tahun 2014, penulis menemukan gejala-gejala bahwa pemilih etnis Tionghoa menentukan pilihan politiknya berdasarkan kesamaan etnis/suku, bukan memilih kontestan yang memiliki kepekaan terhadap masalah nasional atau program kerja yang ditawarkan.

Berdasarkan gejala-gejala yang ditemui yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kebenaran secara ilmiah, dan diberi judul dengan : **“Tipologi Pemilih Etnis Tionghoa pada Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang tahun 2014”** (studi kasus di Kelurahan Tanjungpinang Kota)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : **“Bagaimana Tipologi Pemilih Etnis Tionghoa Pada Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Tahun 2014 di Kelurahan Tanjungpinang Kota?**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui tipologi pemilih Etnis Tionghoa pada Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Tahun 2014 di Kelurahan Tanjungpinang Kota
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tipologi pemilih Etnis Tionghoa pada Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang Tahun 2014 di Kelurahan Tanjungpinang Kota

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini, yaitu:

- a. Secara akademis, untuk penerapan ilmu pengetahuan yang telah peneliti pelajari khususnya dalam bidang Ilmu Pemerintahan terutama dalam bidang kajian ilmu politik.
- b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui tipologi pemilih Etnis Tionghoa pada Pemilihan Legislatif tahun 2014, khususnya di KelurahanTanjungpinang Kota.

D. Metode Penelitian.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data-data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, baik itu untuk tujuan yang bersifat penemuan terhadap data-data baru yang sebelumnya belum pernah diketahui, untuk pembuktian keraguan dari informasi yang diterima dan dalam upaya untuk pengembangan atau memperdalam dari pengetahuan yang telah dimiliki.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan format deskriptif. Penelitian dengan format diskriptif bertujuan menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi

atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat ke permukaan karakter atau gambaran kondisi, situasi atau pun variabel tersebut dan menggunakan hipotesa atau praduga awal terhadap hasil penelitian.

2. Lokasi penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan Tanjungpinang Kota, alasan meneliti disini :

- a. Karena lokasi penelitian merupakan daerah yang mayoritas etnis Tionghoa, sehingga akan lebih mudah bagi peneliti mendapatkan data baik dari masyarakat mau pun dari instansi yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Pertimbangan memilih lokasi penelitian seperti yang disebutkan di atas karena mudah dijangkau, masyarakatnya mudah didekati dan situasi sosialnya mudah diamati, sehingga memperlancar proses penelitian.

3. Populasi dan sampel

3.1. Populasi

Populasi adalah wilayah yang terdiri dari objek atau subjek penelitian yang mempunyai kuantitas tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditetapkan kesimpulannya. Dalam hal ini populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat etnis Tionghoa yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) di Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang. Populasi masyarakat atau pun penduduk yang terdapat di Kelurahan Tanjungpinang Kota berjumlah 7.411 orang, kemudian populasi yang terdaftar dalam DPT berjumlah 5.642 orang, sedangkan Populasi etnis Tionghoa yang terdapat dalam DPT berjumlah 4.916 orang (87%). Sedangkan yang menggunakan hak pilih sebanyak 2903 orang ($2903 \times 87\% = 2526$ etnis Tionghoa yang menggunakan hak pilih), angka tersebut

didapatkan oleh asumsi rasio 87%. Data diperoleh setelah menganalisis DPT Kelurahan Tanjungpinang Kota yang diperoleh melalui KPU kota Tanjungpinang.

3.2 Sampel.

Sugiono (2009:81) berpendapat bahwa pengertian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam menentukan jumlah atau ukuran sampel, peneliti menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Slovin (dalam Husein, 2011:78) yaitu rumus yang digunakan untuk menentukan berapa minimal yang dibutuhkan, jika ukuran populasi diketahui. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, bisa 1%, 5%, 10%.

Untuk mencari sampel dalam penelitian ini dengan tingkat kesalahan 10% maka diperoleh sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{n}{1+Ne^2}$$

$$n = 2526 / (1 + 2526 \times 0,10 \times 0,10)$$

$$n = 2526 / (1 + 25.26) = 26.26$$

$$n = 2526 : 26.26 = 96.19$$

$$n = 96 \text{ (pembulatan)}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dari Slovin dapat disimpulkan bahwa besarnya sampel yang dapat mewakili populasi sebanyak 2.526 pemilih adalah sebanyak 96 orang.

3.3. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *Simple Random Sampling(Probability Sampling)*.

Simple Random Sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. *Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dan untuk menentukan sampel, penulis memakai sistem undian.

Untuk lebih memfokuskan dalam penentuan sampel, peneliti mengambil sampel di 6 TPS dari 14 TPS dengan cara undian, dan didapati TPS 2, 3, 5, 7, 10 dan 12 yang berlokasi di wilayah RW 3, 4, 5, 8, 9, 11 dan RW 12. Jumlah keseluruhan sampel sebanyak $96:6\text{TPS}=16$ orang/TPS

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah peninjauan langsung pada objek yang di teliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Studi lapangan yang dilakukan dengan datang langsung kelokasi penelitian dengan cara menyebarkan angket atau kuisisioner kepada responden yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Responden menjawab dengan memilih pilihan jawaban yang sudah di sediakan dalam daftar pertanyaan. Dan di kenal juga dengan *file research*.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencari sumber data dan informasi melalui buku-buku, jurnal, internet, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Atau dengan kata lain di sebut dengan *library research*.

5. Teknik pengumpulan data.

Untuk mengumpulkan data penelitian maka digunakan tehnik, yaitu :

a. Kuesioner

Metode kuesioner atau angket merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. Setelah diisi, kuesioner atau angket dikirim kembali kepetugas atau peneliti.

b. Observasi

Observasi dilakukan di kelurahan Tanjungpinang Kota yang menjadi obyek penelitian peneliti. Berdasarkan tehnik pengumpulan data tersebut, maka jenis data yang diperoleh dapat bersifat data primer maupun data sekunder

6. Alat Pengelolaan Data

Alat-alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: kuisisioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada responden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Tanjungpinang Kota, dengan menggunakan alat berupa angket.

7. Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan terhadap semua data yang diperoleh agar data tersebut memberikan gambaran tentang Tipologi Pemilih Etnis Tionghoa pada Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang tahun 2014 di Kelurahan Tanjungpinang Kota. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif Kuantitatif.

Penulis melakukan pengukuran dengan menggunakan skala Guttman yaitu penelitian yang ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan, dan selalu dibuat dalam pilihan ganda yaitu “ya dan tidak”, untuk penilaian jawaban misalnya untuk jawaban “ya” diberi skor 1 sedangkan jawaban “tidak” diberi skor 0 dengan demikian bila jawaban dari pertanyaan adalah “ya” diberi skor 1 dan tidak diberi skor 0 bila skor

dikoversikan dalam persentase maka secara logika dapat dijabarkan untuk jawaban setuju skor $1 = 1 \times 100\% = 100\%$, dan tidak setuju diberi skor $0 = 0 \times 0\% = 0\%$.

Hasil yang diperoleh dari sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada sejumlah responden, dipindahkan ke tabel distribusi frekuensi sehingga terlihat jumlah responden yang setuju dan tidak setuju kemudian dikonversikan kedalam persentase sehingga terlihat persentase responden yang setuju dan tidak setuju, persentase setuju dan tidak setuju kemudian ditempatkan ke dalam rentang skala persentase, sehingga terlihat posisi hasil pengukuran.

Agar memudahkan teknis penghitungan, digunakan pendekatan kuantitatif, sehingga penyebutan hasil pengukuran operasional terhadap hasil pengukuran misalnya benar - salah, sesuai -tidak sesuai atau setuju - tidak setuju, di sini digunakan kata setuju – tidak setuju maka untuk rentang pengukuran 0% sampai 50% disebut dengan “mendekati tidak setuju”, sedangkan untuk rentang 51% sampai 100% maka digunakan sebutan “mendekati setuju”.

F. KERANGKA TEORI

1. Perilaku pemilih

Perilaku adalah menyangkut sikap manusia yang akan bertindak sesuatu. Oleh karena itu sangat masuk akal tampaknya apabila sikap ditafsirkan dari bentuk perilaku. Dengan kata lain, untuk mengetahui sikap seseorang terhadap sesuatu, kita dapat memperhatikan perilakunya, sebab perilaku merupakan salah satu indikator sikap individu. (Bawono, Muhammad:2008). Melihat perilaku dalam pemilihan umum atau biasa disebut perilaku pemilih, merupakan suatu elemen penting dalam pembuatan keputusan politik seseorang sebagai warga negara terhadap kepemimpinan bangsa dan negara.

Perilaku pemilih menurut Surbakti yaitu (Efriza, 2012,480) :

“Perilaku pemilih adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih dan tidak memilih (*to vote or not to vote*) di dalam suatu pemilu maka *voters* akan memilih atau mendukung kandidat tertentu”

Pemilih merupakan bagian masyarakat luas yang terdiri dari beragam kelompok yang memiliki keanekaragaman pemikiran dalam mengambil sebuah keputusan untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak. Sehingga hal ini membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk mengetahui perilaku pemilih.

Pendekatan untuk melihat perilaku pemilih juga diungkapkan oleh Adman Nursal (2004 : 54-73), Pendekatan untuk melihat perilaku pemilih juga diungkapkan oleh Adman Nursal (2004 : 54-73),

1. Pendekatan *Sosiologis*
2. Pendekatan *psikologis*
3. Pendekatan *Rasional*
4. Pendekatan *Marketing*

1.1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perilaku Pemilih

Menurut Dan Nimmo (1989), pada hakikatnya pemberi suara akan mempertimbangkan (1) Citra Partai Politik, mencakup antara lain, apa yang dipercaya rakyat, yang diharapkan dari partai politik, dan hubungan antara partai dengan kandidatnya. Misalnya di Amerika Serikat, Partai Demokrat untuk orang kecil dan Partai Republik selalu mendukung perusahaan besar. (2) Citra Kandidat dan gaya personal seorang kandidat politik, para pemberi suara biasanya mencari petunjuk tentang peran politik kandidat terkait pengalaman, latar belakang dan potensi sebagai pejabat publik, (3) Isu Politik, berbagai isu yang dianggap penting dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan menjadi pertimbangan pemberi suara dalam pemilihan umum (Eko Harry Susanto, 2009:70).

Menurut pendekatan marketing, Newman dan Sheth (1985) mengembangkan model perilaku pemilih berdasarkan beberapa domain yang terkait dengan *marketing*. Menurut model ini, perilaku pemilih ditentukan oleh 7 (tujuh) domain kognitif yang berbeda dan terpisah, sebagai berikut (Efriza, 2012 : 530-531) :

1. Isu dan kebijakan politik (*issues and policies*)
2. Citra sosial (*social imagery*)
3. Perasaan emosional (*emotional feelings*)
4. Citra kandidat (*candidate personality*)
5. Peristiwa mutakhir (*current events*)
6. Peristiwa personal (*personal events*)
7. Faktor-faktor epistemik (*epistemic issues*)

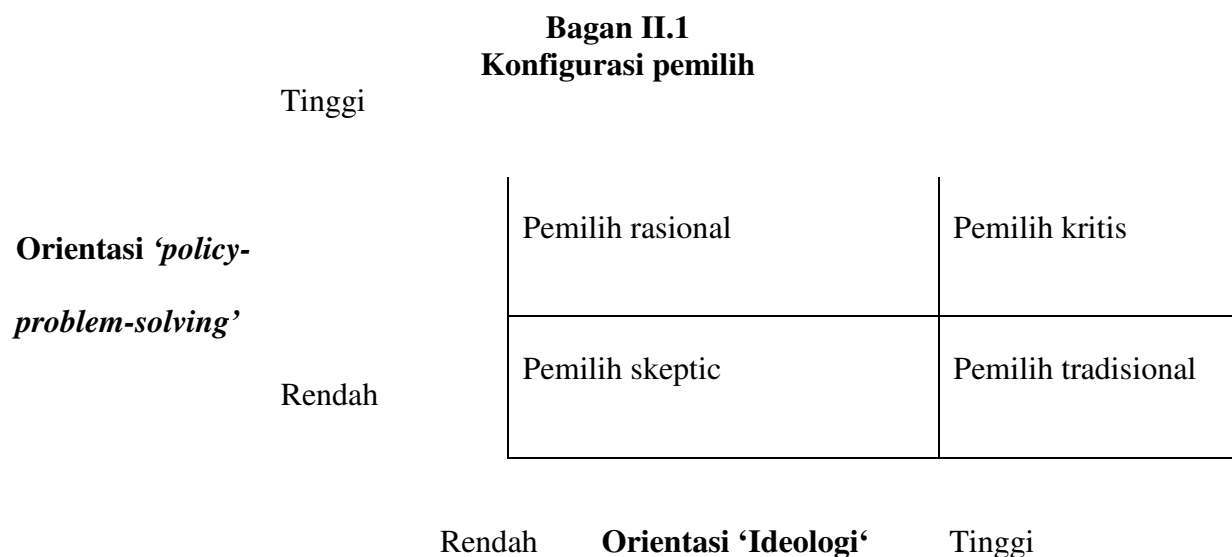
1.2. Tipologi Pemilih

Dalam memilih sebuah partai politik mau pun kontestan, pemilih memiliki perilaku dalam mengambil keputusan untuk menentukan pilihannya. Menurut Firmanzah (2012:113), pada kenyataannya pemilih adalah dimensi yang sangat kompleks. Terkadang perilaku pemilih ini rasional dan non-rasional dalam menentukan keputusannya. Menurut Zamroni (2007:18) Tipologi yaitu karakter yang unik dan spesifik yang melekat pada orang-orang tertentu yang membedakannya dengan orang lain.

Perilaku pemilih yang terkadang rasional dan non rasional menjadikan pemilih memiliki karakter yang berbeda pada setiap pemilih. Selain itu pandangan pemilih dalam menentukan pilihan terhadap partai politik dan kontestan menjadikan karakter yang membedakan pada setiap pemilih. Sehingga pemilih memiliki peran yang berbeda-beda pula pada pemilihan umum.

Firmanzah (2012:113-114), bahwa dalam diri masing-masing pemilih terdapat dua orientasi sekaligus yaitu; (1) orientasi '*policy-problem-solving*', dan (2) orientasi '*ideologi*'. Ketika pemilih menilai partai politik atau seorang kontestan dari kacamata '*policy-problem solving*', yang terpenting bagi mereka adalah sejauh mana para kontestan mampu

menawarkan program kerja atas solusi bagi suatu permasalahan yang ada. Pemilih akan cenderung secara objektif memilih partai politik atau kontestan yang memiliki kepekaan terhadap masalah nasional dan kejelasan program kerja. Partai politik atau kontestan yang arah kebijakannya tidak jelas akan cenderung tidak dipilih. Sementara pemilih yang lebih mementingkan ikatan ‘*ideology*’ suatu partai atau kontestan, akan lebih menekankan aspek-aspek subjektifitas seperti kedekatan nilai, budaya, agama, moralitas, norma, emosi dan psikografis. Semakin dekat kesamaan partai politik atau calon kontestan, pemilih jenis ini akan cenderung memberikan suaranya kepartai dan kontestan tersebut. Berdasarkan dua orientasi di atas maka terdapat konfigurasi pemilih seperti di bawah ini :



Sumber: Firmanzah (2012:19)

Firmanzah (2012: 120-126) memetakan tipologi ke dalam empat kolom tipologi pemilih, yaitu :

1.2.1 Pemilih Skeptis

Pemilih skeptis adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi *ideology* cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan, juga sebagai sesuatu penting.

Keinginan untuk terlibat dalam sebuah partai politik pada pemilih jenis ini sangat kurang, karena ikatan ideologis mereka memang rendah sekali. Mereka juga kurang memedulikan program kerja atau '*platform*' dan kebijakan sebuah partai politik.

1.2.2. Pemilih tradisional

Pemilih dalam jenis ini memiliki orientasi *ideology* yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai suatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan social-budaya, nilai asal-usul, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik. Biasanya pemilih jenis ini lebih mengutamakan figur dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah partai politik atau seorang kontestan. Salah satu karakteristik mendasar jenis pemilih ini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan konservatif dalam memegang nilai serta paham yang dianut. Pemilih tradisional adalah jenis pemilih yang bisa dimobilisasi selama periode kampanye, loyalitas tinggi merupakan salah satu ciri khas yang paling kelihatan bagi pemilih jenis ini.

1.2.3. Pemilih Kritis

Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih terhadap sebuah partai politik atau seorang kontestan cukup tinggi dan tidak semudah '*rational voter*' untuk berpaling ke partai lain. Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis, artinya mereka akan selalu menganalisis kaitan antara system nilai partai (*ideology*) dengan kebijakan yang akan dibuat. Pemilih jenis ini harus di '*manage*' sebaik mungkin oleh sebuah partai politik atau seorang kontestan, pemilih memiliki keinginan dan kemampuan untuk terus memperbaiki kinerja

partai, sementara kemungkinan kekecewaan yang bisa berakhir ke frustrasi dan pembuatan partai politik tandingan juga besar.

1.2.4. Pemilih Rasional

Pemilih memiliki orientasi pada '*policy problem solving*' dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik dan kontestan dalam program kerjanya. Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ideology kepada suatu partai atau seorang kontestan. Faktor seperti paham, asal-usul, nilai tradisional, budaya, agama, dan psikografis memang dipertimbangkan juga, tetapi bukan hal yang signifikan. Hal yang terpenting bagi jenis pemilih ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan, daripada paham dan nilai partai atau kontestan.

2. Partisipasi Politik

2.1. Partisipasi Politik

Keikutsertaan Warga Negara atau masyarakat dalam suatu kegiatan politik, tidak terlepas dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat. Masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan pemimpin pemerintahan, baik di tingkat pusat sampai pada tingkat terendah yakni desa. Menurut Budiardjo (2008: 19) menjelaskan bahwa:

“Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama”.

Berdasarkan teori tersebut partisipasi merupakan faktor terpenting dalam setiap sikap yang dilakukan oleh seseorang atau individu baik dalam suatu organisasi, yang pada akhirnya dapat mendorong seseorang tersebut mencapai tujuan yang akan dicapai oleh organisasinya dan mempunyai tanggung jawab bersama dari setiap tujuan tersebut.

Selain itu Ramlan Surbakti dalam Budiardjo (2008: 26) memberikan definisi bahwa:

“Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik”.

Berdasarkan teori di atas, dapat dikatakan bahwa partisipasi merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu pelaksanaan demokrasi. Dimana pelaksanaan demokrasi dapat menentukan keputusan politik yang akan dibuat dan dilaksanakan pemerintah serta dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menurut Usman dalam Budiardjo (2008: 32) partisipasi adalah partisipasi itu dapat bersifat perorangan atau secara kelompok, diorganisasikan atau secara spontan, ditopang atau sporadis, secara baik-baik atau dengan kekerasan, legal atau tidak legal, aktif atau tidak aktif. Partisipasi pada umumnya bersifat perorangan atau kelompok yang dibentuk dalam suatu organisasi secara baik-baik tanpa adanya kekerasan dalam bentuk apapun. Pelaksanaan partisipasi dari Warga Negara atau masyarakat dalam salah satu contoh keputusan yang dibuat oleh pemerintah yakni pemilihan umum di tingkat pusat dan di tingkat desa.

2.2. Konsep Operasional

Untuk lebih memperjelas di dalam menjawab permasalahan penelitian, maka dalam hal ini peneliti mencoba mengoperasionalkan konsep, yaitu menguraikan secara spesifik tentang konsep yang akan digunakan. Maka berkaitan dengan itu, untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekeliruan yang digunakan, maka peneliti menggunakan konsep tentang Tipologi Pemilih. Konsep yang dioperasionalkan oleh peneliti disesuaikan dengan keadaan yang ada pada Masyarakat pada pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang tahun 2014 di Kelurahan Tanjungpinang Kota. Adapun teori yang peneliti gunakan ialah menurut

pendapat dari firmanzah (2012: 120). Mengenai indikator yang dapat mempengaruhi Perilaku Pemilih adalah:

2.2.1. Pemilih Skeptis

Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi yang cukup tinggi dengan partai politik atau kontestan dan keinginan untuk terlibat dalam partai politik sangat kurang. Mereka berkeyakinan siapa pun atau partai apa pun yang menang tidak akan bisa membawa bangsa kearah yang lebih baik sesuai dengan yang mereka harapkan.

Indikator:

- a. Keinginan terlibat dalam sebuah parpol
- b. Kepedulian terhadap *platform* dan kebijakan parpol
- c. Pertimbangan memilih (acak/random)
- d. Tingkat kepercayaan terhadap perubahan yang ditawarkan

2.2.2 Pemilih tradisional

Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideology yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seseorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik. Kebijakan ekonomi, kesejahteraan, pemerataan pendapatan dan pendidikan dan pengurangan angka inflasi dianggap sebagai parameter kedua.

Indikatornya:

- a. Kedekatan atau kesamaan etnis/suku
- b. Kedekatan atau kesamaan agama/kepercayaan
- c. Figur dan kepribadian
- d. Mobilisasi dalam kampanye

2.2.3. Pemilih Kritis

Merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih terhadap sebuah partai atau seorang kontestan cukup tinggi dan tidak semudah “rational voter” untuk berpaling ke partai lain.

Indikatornya:

- a. Pengetahuan terhadap nilai-nilai ideologis, visi misi, dan program kerja
- b. Kejelasan dan kebaikan ideologi, visi, misi, dan program kerja
- c. Memantau dan mengkritisi kinerja caleg dan parpol
- d. Loyalitas terhadap parpol atau caleg (cenderung loyal)

2.2.4. Pemilih Rasional

Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon kontestan dalam program kerjanya. Hal yang terpenting bagi pemilih ini adalah apa yang biasa dan telah dilakukan oleh partai politik atau kontestan partai. Indikatornya:

- a. Pengetahuan tentang Kinerja masa lalu parpol atau caleg
- b. Reputasi parpol atau caleg
- c. Pengetahuan tentang visi, misi, dan program kerja parpol atau caleg
- d. Loyalitas terhadap parpol atau caleg (cenderung berpindah jika kecewa)

G. PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

Mengawali pembahasan tentang hasil penelitian dari tipologi pemilih etnis Tionghoa pada Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang tahun 2014 di Kelurahan Tanjungpinang Kota, maka sebelumnya penulis akan menyajikan karakteristik dari responden.

Adapun responden dalam penelitian ini sebanyak 96 orang yang diambil dengan *Simple Random Sampling(Probability Sampling)* yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Beberapa data tentang karakteristik responden yang akan disajikan sebagai berikut:

1.1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel berikut menunjukkan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel IV.1
Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase
1	Laki-laki	60	62.5
2	Perempuan	36	37.5
Jumlah		96	100%

Sumber: kuesioner

Berdasarkan pada tabel IV.1 terlihat jelas bahwa responden berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki berjumlah 60 orang atau 62.5%. Sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 36 orang atau 37.5%.

1.2. Karakteristik responden berdasarkan usia

Tingkat usia yang bervariasi dibagi dalam tiap-tiap kelompok agar mudah dipahami. Karakteristik responden pada Kelurahan Tanjungpinang Kota terdiri dari tingkat usia yang berbeda yang mulai dari usia 17 tahun hingga 60 tahun keatas, karena responden yang dipilih ialah responden yang sudah memiliki hak suara. Berdasarkan umur atau usia dapat dilihat pada tabel IV.2 di bawah ini.

Tabel IV.2
Karakteristik responden berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah (orang)	Persentase
1	17-30	5	5
2	31-40	27	28
3	41-60	41	43
4	>60	23	24
Jumlah		96	100%

sumber : Data kuesioner

Pada tabel IV.2 tersebut didapati jumlah responden berdasarkan usia yaitu 17-30 tahun sebanyak 5 orang (5%), usia 31-40 tahun sebanyak 27 orang (28%), kemudian usia 41-60 tahun yaitu sebanyak 41 orang (43%) dan usia diatas 60 tahun sebanyak 23 orang (24%). Dari data di atas dapat dilihat bahwa persentase pada usia 41-60 tahun mendominasi responden. Pada rentang usia tersebut pada umumnya mereka lebih bijaksana dalam menanggapi isu-isu yang sedang berkembang. Selain itu setidaknya, pada rentang usia tersebut responden sudah mengalami/ mengikuti beberapa kali pemilihan umum. Baik itu sebelum masa reformasi sampai dengan masa saat ini, sehingga responden dengan rentang usia dimaksud sudah memiliki pengalaman yang cukup terkait keikutsertaan dalam Pemilihan Umum, maupun pengalaman dalam analisis terhadap partai. Artinya responden dengan usia tersebut, penulis beranggapan bahwa responden telah mengetahui latar belakang dan sejarah Partai Politik.

1.2.3. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel berikut menunjukkan jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel IV.3
Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	25	25
2	SD	47	49
3	SMP/SLTP	17	18
4	SMA/SLTA	7	7
Jumlah		96	100%

sumber: data kuesioner 2015

Pada uraian tabel IV.3 menunjukkan tingkat pendidikan terakhir responden masyarakat Kelurahan Tanjungpinang Kota, dari 96 responden yaitu tidak sekolah sebanyak 25 orang (25%), tamatan SD sebanyak 47 orang (49%) SMP/SLTP sebanyak 17 orang (18%) dan tamatan SMA/SLTA sebanyak 7 orang (7%). Berdasarkan data tersebut responden

dengan tingkat pendidikan terakhir terbanyak adalah responden dengan tamatan SD yaitu sebanyak 47 orang (49%). Konsekuensi dari kualitas pemilih yang rendah (tamatan SD dan tidak tamat SD), maka pemilih ini rentan memilih calon pemimpin maupun caleg hanya berdasarkan ilmu kira-kira. Pemilih jenis ini tidak faham *track record* politisi itu apa dan bagaimana cara menilainya. Pemilih jenis ini tidak tahu apa kriteria calon pemimpin dan caleg yang berkualitas. Akibatnya memilih hanya berdasarkan ilmu kira-kira saja.

2. Standard pengukuran

Tiap-tiap tipologi mempunyai metode pengukuran yang sama, dan masing-masing menggunakan 4 (empat) indikator dan 4 (empat) pertanyaan, jumlah keseluruhan 16 (enam belas) pertanyaan dengan 96 (sembilan puluh enam) responden. Hanya saja untuk pemilih skeptis jawaban “Tidak” diberi skor 1 dan jawaban “Ya” di beri skor 0. Sementara untuk kategori pemilih tradisional, skeptis, dan rasional maka jawaban “Ya” diberi skor 1 dan jawaban “Tidak” diberi skor 0.

Adapun standard pengukuran untuk tiap-tiap tipologi pemilih sebagai berikut:

2.1. Tipologi Pemilih skeptis:

Tipologi pemilih skeptis terdiri dari empat indikator yang akan dijawab sembilan puluh enam (96) orang responden. Sehingga total jawaban adalah $4 \times 96 = 384$. Sehingga standard pengukurannya adalah:

$$= \frac{\text{jumlah jawaban (tidak)}}{\text{seluruh jawaban}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{jumlah jawaban (tidak)}}{96 \times 4} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{jumlah jawaban (tidak)}}{384} \times 100\%$$

=

Dengan ketentuan jika persentase hasil penghitungan yang diperoleh 0 sampai dengan 50% maka akan dikategorikan tidak skeptis. Jika persentase perhitungannya mencapai angka 51 sampai dengan 100% maka akan dikategorikan skeptis.

2.2. Tipologi pemilih tradisional

Tipologi pemilih tradisional terdiri dari empat indikator yang akan dijawab sembilan puluh enam (96) orang responden. Sehingga total jawaban adalah $4 \times 96 = 384$. Sehingga standard pengukurannya adalah:

$$= \frac{\text{jumlah jawaban (ya)}}{\text{seluruh jawaban}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{jumlah jawaban (ya)}}{96 \times 4} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{jumlah jawaban (ya)}}{384} \times 100\%$$

=

Dengan ketentuan jika persentase hasil penghitungan yang diperoleh 0 sampai dengan 50% maka akan dikategorikan tidak tradisional. Jika persentase perhitungannya mencapai angka 51 sampai dengan 100% maka akan dikategorikan tradisional.

2.3. Tipologi pemilih kritis

Tipologi pemilih kritis terdiri dari empat indikator yang akan dijawab sembilan puluh enam (96) orang responden. Sehingga total jawaban adalah $4 \times 96 = 384$. Sehingga standard pengukurannya adalah:

$$= \frac{\text{jumlah jawaban (ya)}}{\text{seluruh jawaban}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{jumlah jawaban (ya)}}{96 \times 4} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{jumlah jawaban (ya)}}{384} \times 100\%$$

=

Dengan ketentuan jika persentase hasil penghitungan yang diperoleh 0 sampai dengan 50% maka akan dikategorikan tidak kritis. Jika persentase perhitungannya mencapai angka 51 sampai dengan 100% maka akan dikategorikan kritis.

2.4. Tipologi pemilih rasional

Tipologi pemilih rasional terdiri dari empat indikator yang akan dijawab sembilan puluh enam (96) orang responden. Sehingga total jawaban adalah $4 \times 96 = 384$. Sehingga standard pengukurannya adalah:

$$= \frac{\text{jumlah jawaban (ya)}}{\text{seluruh jawaban}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{jumlah jawaban (ya)}}{96 \times 4} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{jumlah jawaban (ya)}}{384} \times 100\%$$

=

Dengan ketentuan jika persentase hasil penghitungan yang diperoleh 0 sampai dengan 50% maka akan dikategorikan tidak rasional. Jika persentase perhitungannya mencapai angka 51 sampai dengan 100% maka akan dikategorikan rasional.

3. Uji koefisien Reprodusibilitas dan Skalabilitas

Sebelum melakukan penyebaran kuesioner, peneliti terlebih dahulu melakukan uji koefisien Reprodusibilitas dan Skalabilitas terhadap kuesioner yang akan disebarkan. Berdasarkan Pengujian tersebut dilakukan terhadap 30 orang responden. Uji koefisiensi reprodusibilitas dan skalabilitas dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$= kr = 1 - \frac{e}{n}$$

$$= ks = 1 - \frac{e}{x}$$

Keterangan:

Kr = Koefisien Reprodusibilitas

Ks = Koefisiensi Skalabilitas

Ada pun hasil uji Koefisien Reprodusibilitas dan skalabilitas tersebut adalah:

Tabel IV. 4
Uji Koefisien Reprodusibilitas dan skalabilitas

No Res	Skeptis				Tradisional				Kritis				Rasional				Skor	Eror
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	6	2
2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1
3	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
4	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
5	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2
6	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2
7	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	2
8	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
9	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1
10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	1
11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	6	2
12	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
13	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	3
14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	1
15	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2
16	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2
17	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1
18	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	3
19	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	5	1
20	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	6	2
21	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	1
22	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1
23	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2
24	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
25	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
26	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
27	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	1
28	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2
29	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2
30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	2

Jumlah Eror 46
 Jumlah Skor 153
 Jumlah Jawaban 480

Keterangan:

Kr:

$$= 1 - \frac{46}{480}$$

$$= 1 - 0.09583 = 0.90$$

Ks:

$$= 1 - \frac{46}{0.5 \times (480 - 153)}$$

$$= 1 - (480 - 153)$$

$$= 1 - (327 \times 0,5 = 163,5)$$

$$= 1 - 0.28$$

$$= 0.72$$

Berdasarkan standard yang telah ditetapkan bahwa kuesioner yang memiliki skala Kr 0,90 ke atas dan skala yang memiliki Ks = 0,60 ke atas dianggap cukup baik untuk digunakan. Sedangkan berdasarkan hasil uji Kr dan Ks terhadap kuesioner yang akan digunakan diperoleh nilai skala Kr sebesar 0.90 dan Ks sebesar 0.72 sehingga dapat disimpulkan kuesioner tersebut dianggap cukup baik untuk digunakan.

4. Analisa data

4.1. Pemilih skeptis

Pemilih Skeptis adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan, juga tidak menjadikan kebijakan menjadi sesuatu yang penting. Kurangnya keinginan untuk terlibat dalam sebuah partai politik.

Adapun indikatornya sebagai berikut:

- a. Keinginan terlibat dalam sebuah parpol
- b. Kepedulian terhadap *platform* dan kebijakan parpol
- c. Pertimbangan memilih (acak/random)
- d. Tingkat kepercayaan terhadap perubahan yang ditawarkan

Tabel IV.5
Persentase tingkat Skeptis Masyarakat etnis Tionghoa Kelurahan Tanjungpinang Kota

No	Pertanyaan	Jawaban		Jumlah	Persentase (%)
		Tidak	Ya		
1	Apakah anda menjadi simpatisan caleg dan parpol yang anda pilih ?	71	25	96	74
2	Apakah anda mengetahui rencana kerja/platform dan kebijakan parpol pengusung caleg yang anda pilih?	49	47	96	51
3	Apakah anda memilih caleg dan parpol dengan pertimbangan tertentu seperti visi, misi dan kapabilitas ?	48	48	96	50
4	Apakah menurut anda caleg atau partai yang anda pilih akan membawa perubahan bagi kehidupan anda ?	50	46	96	52
	Jumlah	218	166	384	227%

Sumber : Data olahan kuesioner

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa untuk pertanyaan nomor 1 terdapat 71 orang atau 74% dari 96 orang responden menjawab “tidak” dan 26% atau 25 orang responden menjawab “ya”. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar pemilih bukan merupakan simpatisan salah satu partai politik maupun calon legislatif. Dapat dilihat bahwa sebagian besar dari pemilih tidak ikut menjadi simpatisan dari parpol tertentu sedangkan sebagian kecilnya lagi ikut andil dalam kegiatan-kegiatan partai politik maupun calon legislatif yang mereka pilih. Melihat kenyataan tersebut dan juga berdasarkan pantauan penulis di lapangan terlihat bahwa sebagian besar warga Kelurahan Tanjungpinang Kota tidak tertarik untuk ikut menjadi salah satu simpatisan anggota Parpol atau salah satu calon anggota legeslatif yang ada. Mungkin hal ini dikarenakan waktu untuk menekuni bisnis sehari-hari saja sudah tidak cukup apalagi untuk terlibat dan menjadi simpatisan dari salah satu partai politik atau salah satu calon anggota legeslatif

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jawaban dari pertanyaan nomor 2 mengenai “apakah mereka mengetahui *platform* dan kebijakan yang dibuat oleh partai politik

pengusung calon legislatif yang mereka pilih?”. Dari 96 orang responden dalam penelitian ini, ada sekiranya 51% atau 49 orang tidak mengetahui *platform* dan kebijakan yang akan dibuat oleh partai politik mau pun calon legislatif. Jumlah ini sedikit lebih banyak jika dibandingkan dengan persentase pemilih yang mengetahui kebijakan dari partai politik atau kontestan, yaitu sebanyak 49% atau 47 orang. Dari pantauan penulis di lapangan, pada umumnya masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Tanjungpinang Kota kurang memperdulikan partai pengusung dari seorang calon legislatif yang mereka pilih.

Penelitian di lapangan penulis juga menemukan bahwa dalam masa kampanye partai politik atau pun calon anggota legeslatif yang akan bertarung dalam pemilihan umum tidak melakukan upaya yang maksimal dalam memperkenalkan *platform* maupun kebijakan parpolnya masing-masing. Dalam penelitian para responden mengatakan bahwa parpol tidak ada melakukan kampanye terbuka di wilayah dapil masing-masing. Responden mengatakan bahwa satu-satunya kampanye yang dilakukan secara terbuka hanyalah menempelkan baliho atau poster-poster di persimpangan jalan dan di dinding rumah-rumah warga, yang pada kenyataannya pada poster tersebut biasanya tidak ada menuliskan kebijakan dan *platform* partainya.

Meski demikian ada beberapa calon anggota legeslatif melakukan kampanye dengan mengirimkan pesan singkat kepada tokoh-tokoh masyarakat Tionghoa di Kelurahan Tanjungpinang Kota. Tetapi dalam pesan singkat tersebut hanya himbauan berupa untuk jangan lupa memilih calon anggota legeslatif tersebut dan jangan lupa menggunakan hak suaranya. Dalam pesan tersebut tidak pernah menyampaikan kebijakan dan rencana kerja apa yang akan diambil. Beberapa hal tersebutlah yang menjadikan 51% responden mengatakan bahwa responden tidak mengetahui *platform* atau kebijakan parpol salah satu calon anggota legeslatif.

Berdasarkan data di atas menunjukkan tingkat ketidakpedulian masyarakat untuk mengetahui kemampuan para calon legislatif ini terbilang tinggi, sebagaimana yang diuraikan dalam tabel diatas jumlah persentase ketidaktahuan masyarakat Kelurahan Tanjungpinang Kota tentang visi, misi dan kemampuan calon legislatif ini sebesar 52% atau 50 orang memilih untuk tidak mempertimbangkan visi, misi dan kemampuan calon legislatif mau pun partai pengusung dalam pemilihan legislatif 2014 lalu.

Sementara itu 46 orang lebih mempertimbangkan hal tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa sebagian responden menganggap bahwa visi misi dan kapabilitas seseorang tidak menentukan baik buruknya calon legeslatif ketika sudah terpilih. Mereka beranggapan bahwa ketika anggota legeslatif sudah terpilih, maka mereka selalu lupa terhadap visi misi yang mereka kampanyekan sebelumnya. Hal tersebut menjadi pemicu ada sekira 50% atau sekitar 48 responden tidak mempertimbangkan visi misi dan kapabilitas sebuah calon anggota legeslatif dan partai politik.

Sebagaimana jawaban dari pertanyaan nomor 4 mengenai apakah calon legislatif atau partai politik yang mereka pilih akan membawa “perubahan” bagi kehidupan mereka, jawaban dari pertanyaan tersebut diketahui 52% atau 50 orang responden berkeyakinan bahwa siapa pun dan partai apa pun yang memenangkan pemilu tidak akan bisa membawa perubahan yang lebih baik pada kehidupan mereka, hilangnya kepercayaan masyarakat akan janji-janji yang dilontarkan bukannya tidak berdasar, mereka berkaca dari pengalaman lalu yang cenderung menilai janji-janji partai banyak yang tidak ditepati. Sementara perilaku para wakil rakyat dinilai banyak yang lebih memperdulikan kepentingan pribadinya, ketimbang kepentingan rakyat banyak.

Berdasarkan tabel di atas dapat juga dianalisa apakah pemilih termasuk dalam tipologi skeptis atau tidak. Dengan pengukuran sebagai berikut:

$$= \frac{\text{jumlah jawaban (tidak)}}{96 \times 4} \times 100\%$$

$$= \frac{218}{384} \times 100\%$$

$$= 57\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh hasil sebesar 57% dan berdasarkan standard pengukuran yang telah ditetapkan jika hasil perhitungan berjumlah 0 sampai dengan 50% maka dikategorikan sebagai pemilih dengan tipologi yang tidak skeptis, dan jika hasil perhitungan berjumlah 51% sampai dengan 100%, maka dapat dikategorikan sebagai pemilih dengan tipologi skeptis. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemilih etnis Tionghoa di Kelurahan Tanjungpinang Kota termasuk ke dalam tipologi pemilih skeptis. karena dalam menentukan pilihannya responden cenderung tidak memperhatikan kinerja parpol, baik sebelum berlansungnya Pemilu maupun sesudah berlansungnya Pemilu.

4.2. Pemilih Tradisional

Pemilih dalam jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seseorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam mengambil keputusan, pemilih ini cenderung mengutamakan kedekatan sosial budaya, nilai, asal usul, paham dan agama sebagai ukuran dalam menentukan pilihan. Kebijakan semisal ekonomi, kesejahteraan, pemerataan pendapatan dan pendidikan, dan pengurangan angka inflasi dianggap barometer kedua. Mereka tidak terlalu memusingkan diri pada kebijakan apa yang telah dilakukan partai politik yang mereka dukung.

Adapun indikatornya sebagai berikut:

- a. Kedekatan atau kesamaan etnis/suku
- b. Kedekatan atau kesamaan agama/kepercayaan
- c. Figur dan kepribadian
- d. Mobilisasi dalam kampanye

Tabel IV.6
Persentase tingkat Tradisional masyarakat etnis Tionghoa Kelurahan Tanjungpinang Kota

No	Pertanyaan	Jawaban		Jumlah	Persentase (%)
		Ya	Tidak		
5	Apakah caleg yang anda pilih berasal dari etnis/ suku yang sama dengan anda dan apakah karena alasan tersebut anda menentukan pilihan ?	51	45	96	53
6	Apakah caleg yang anda pilih memiliki kepercayaan/agama yang sama dengan anda dan apakah karena alasan tersebut anda menentukan pilihan ?	41	55	96	43
7	Apakah caleg dan parpol yang anda pilih merupakan caleg dan parpol yang anda kagumi atau anda sukai ?	46	50	96	48
8	Apakah anda pernah terlibat/ikut serta dalam kampanye yang dilakukan oleh caleg atau parpol yang anda pilih ?	33	63	96	34
Jumlah		171	213	384	178%

Sumber: data kuesioner

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa untuk pertanyaan nomor 5 mengenai “apakah kesamaan etnis/suku menjadi alasan dalam menentukan pilihan?”, terdapat sekitar 51 orang responden atau 53% menjawab bahwa mereka memilih calon legislatif karena kesamaan etnis/suku. Mereka menganggap dengan keadaan saat ini, di mana etnis Tionghoa masih menjadi etnis minoritas, sehingga mereka membutuhkan wakil yang berasal dari etnis/suku yang sama agar setidaknya sedikit aspirasi mereka akan tersampaikan. Hal tersebut sangat sesuai dengan hasil Pemilu tahun 2014 laluyakni Saudara Freddy, SE, MM, Simon Awantoko, Angel Chen SE, Fengky Fesinto, SH, MH, IR. Hartono, Kasimo, Kendi Agustin dan saudara Beni. Yang berhasil mendapatkan kursi legislatif dari etnis tersebut berjumlah tiga (3) orang, yakni: Fengki Fesinto, SH, MH, Beni, dan Simon Awantoko dengan jumlah suara yang signifikan. Sementara 45 orang responden atau 47% dari mereka mengatakan bahwa kesamaan suku bukan menjadi alasan mereka dalam menentukan pilihan.

Kehidupan keagamaan dan relasi antar umat beragama, maupun hubungan mayoritas (Budha) dengan kelompok minoritas (Islam) di Kelurahan Tanjungpinang Kota tidak ada masalah sama sekali sejauh ini. Dan di dalam konteks politik pun tidak pernah terjadi politisasi agama atas cara dan situasi tertentu oleh kalangan elit politik yang berasal dari etnis Tionghoa khususnya untuk mendapatkan suara di dalam pemilihan legislatif tahun 2014 dengan memainkan isu agama. Etnis Tionghoa yang mayoritas memeluk agama budha dan konghucu, kesamaan kepercayaan/agama bukanlah menjadi hal yang utama dalam menentukan pilihan. Hal ini bisa dilihat dari tabel diatas dengan persentase yang menunjukkan hanya sebagian kecil saja dari responden memilih berdasarkan agama yaitu 41 orang (43%) sementara sebagian besar dari mereka memberi jawaban memilih tidak dikarenakan kesamaan keyakinan/agama.

Sebagian kecil masyarakat etnis Tionghoa yang berada di Kelurahan Tanjungpinang Kota karena mengagumi dan menyukai caleg dan parpol, seperti yang terlihat di Tabel IV.6 dengan jumlah jawaban 46 orang responden atau 48%, sedangkan sebanyak 50 orang responden atau 52% mengatakan bahwa mereka tidak mengagumi sosok dari caleg yang mereka pilih. Pada penelitian ini diketahui alasan sebagian mereka menentukan pilihannya bukan kepada calon yang mereka sukai atau kagumi. Salah satu alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa tidak ada calon yang benar-benar dapat mewakili kepentingan mereka, dan juga tidak ada calon anggota legeslatif yang benar-benar bisa bekerja dan dapat memperbaiki kehidupan mereka kearah yang lebih baik. Dengan alasan tersebut akhirnya mereka lebih cenderung menentukan pilihannya berdasarkan kesamaan etnis, agar setidaknya aspirasi mereka akan lebih mudah untuk tersalurkan.

Kelurahan Tanjungpinang Kota merupakan pusat sentra ekonomi dan pusat perdagangan. Sebagian pelaku ekonomi dan pedagang berasal dari masyarakat Kelurahan Tanjungpinang Kota itu sendiri khususnya masyarakat etnis Tionghoa. Bagi mereka waktu

adalah uang. Karena dari itu tingkat persentase (63%) untuk tidak terlibat dalam kampanye yang dilakukan oleh partai politik mau pun calon legislatif sangat tinggi, seperti sebagaimana yang terlampir dalam tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden menjawab tidak pernah terlibat dalam kampanye. Dilihat dari segi finansial pun mereka berada di atas rata-rata, sehingga mereka tidak mudah untuk terpengaruh dari iming-iming berupa materi yang selalu didapati oleh massa kampanye. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis banyak calon anggota legislatif melalui tim sukses masing-masing menjanjikan uang dengan jumlah tertentu.

Penyebab lainnya adanya 63% responden yang tidak pernah mengikuti/terlibat dalam masa kampanye dikarenakan sistem kampanye yang dilakukan oleh beberapa partai politik atau calon anggota legislatif tidak melakukan kampanye terbuka. Kampanye yang dilakukan oleh parpol dan calon anggota legislatif hanya berupa penempelan baliho dan stiker-stiker. Selain itu juga berupa pesan pendek, itu pun pesan melalui telepon seluler tersebut terbatas hanya kepada tokoh-tokoh Tionghoa saja. Jika Pesan tersebut di teruskan oleh Tokoh tersebut maka ada kemungkinan pesan tersebut sampai kepada pemilih, dan sebaliknya jika tidak maka kampanye tersebut akan langsung terputus.

Masa kampanye yang diberikan KPU tidak digunakan secara optimal oleh parpol dan calon anggota legislatif di daerah pemilihan Kelurahan Tanjungpinang Kota. Kemungkinan hal tersebut mempengaruhi rendahnya tingkat keikutsertaan yang menggunakan hak pilih dalam pemilu tahun 2014 yang hanya sekitar 2.903 orang dari 5.642 daftar pemilih tetap.

Berdasarkan tabel di atas dapat juga dianalisa apakah masyarakat etnis Tionghoa yang berada di Kelurahan Tanjungpinang Kota termasuk dalam tipologi rasional atau tidak. Dengan pengukuran sebagai berikut:

$$= \frac{\text{jumlah jawaban (ya)}}{96 \times 4} \times 100\%$$

$$= \frac{171}{384} \times 100\%$$

$$= 44.53\%$$

Dari perhitungan di atas, diperoleh hasil yaitu sebesar 45% dan berdasarkan standard pengukuran yang telah ditetapkan jika hasil perhitungan berjumlah 51% sampai dengan 100%, maka dapat dikategorikan sebagai pemilih dengan tipologi tradisional, dan jika hasil perhitungan 0 sampai dengan 50% maka dapat dikategorikan sebagai pemilih yang tidak tradisional. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemilih etnis Tionghoa di Kelurahan Tanjungpinang Kota tidak termasuk ke dalam tipologi pemilih tradisional.

4.3. Pemilih Kritis

Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih terhadap sebuah partai atau seorang kontestan cukup tinggi dan tidak mudah untuk berpaling ke partai lain. Mereka akan selalu menganalisis kaitan antara sistem nilai partai (ideologi) dengan kebijakan yang di buat.

Adapun indikator-indikatornya sebagai berikut:

- a. Pengetahuan terhadap nilai-nilai ideologis, visi misi, dan program kerja
- b. Kejelasan dan kebaikan ideologi, visi, misi, dan program kerja
- c. Memantau dan mengkritisi kinerja caleg dan parpol.
- d. Loyalitas terhadap parpol atau caleg (cenderung loyal)

Tabel IV.7
Persentase Tingkat Kritis Masyarakat Etnis Tionghoa Kelurahan Tanjungpinang Kota

No	Pertanyaan	Jawaban		Jumlah	Persentase (%)
		Ya	Tidak		
9	Apakah anda mengetahui dan mengagumi nilai-nilai ideologis dianut serta visi, misi dan program kerja yang ditawarkan oleh caleg dan parpol yang anda pilih ?	2	94	96	2
10	Apakah anda memilih caleg dan parpol karena menganut ideologi yang anda kagumi dan memiliki visi, misi, dan program kerja yang baik ?	2	94	96	2
11	Apakah anda akan terus memantau bagaimana kinerja caleg dan parpol yang anda pilih dan memberikan kritik jika kinerjanya tidak sesuai dengan yang anda harapkan ?	2	94	96	2
12	Jika caleg yang anda pilih sesuai dengan harapan anda, apakah anda akan selalu loyal, setia, dan tidak akan berpindah pilihan dari parpol dan caleg yang anda pilih ?	2	94	96	2
Jumlah		8	376	384	8

Sumber: data kuesioner

Pemahaman nilai-nilai ideologi masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Tanjungpinang Kota terhadap sebuah partai masih sangat rendah dan juga kualitas visi, misi dan program kerja dari kandidat pun bukanlah sesuatu hal yang penting bagi masyarakat etnis Tionghoa dalam menentukan pilihan. Hal ini terlihat dari tingkat pengetahuan mereka akan hal tersebut. Hanya dua (2) orang responden yang menjawab mengetahui nilai-nilai ideologi, visi, misi dan program kerja yang ditawarkan oleh para kontestan mau pun dari partai politik selebihnya 94 orang responden menjawab tidak mengetahui akan hal tersebut, dan untuk pertanyaan selanjutnya hampir semua responden menjawab tidak mempertimbangkan nilai-nilai ideologi partai, visi, misi dan program kerja para kontestan apakah baik atau tidak.

Hal tersebut sesuai dengan data yang diperoleh pada pertanyaan melalui indikator-indikator pemilih skeptis dan tradisional yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Bahwa sebagian besar dari mereka memilih parpol atau calon anggota legeslatif bukan karena mengagumi ideologi partai atau pertimbangan baik buruknya visi, misi dan program kerja yang ditawarkan para kontestan. Janji-janji politik sepertinya hanya menjadi formalitas belaka atau semacam kebiasaan yang begitu mudah diungkapkan tanpa ada tindak lanjut yang jelas. Barangkali sudah lumrah di telinga masyarakat pada umumnya mendengar janji-janji politik yang hanya sekedar janji yang tidak kunjung terealisasi, hal inilah yang membuat ketidakpedulian pemilih akan pertimbangan visi, misi atau pun program yang ditawarkan oleh kontestan.

Selain itu keterlibatan parpol dan calon anggota legeslatif dalam proses kehidupan warga sehari-hari juga dirasa kurang maksimal. Para kandidat dan parpol hanya hadir pada saat adanya pemilihan umum, setelah selesai proses tersebut dan mendapatkan apa yang diinginkan, para anggota legeslatif dan partai politik tidak pernah terlibat dalam kehidupan sosial warga.

Kampanye yang dilakukan hanya sekedar penempelan baliho dan stiker-stiker yang kemudian tujuan yang diambil oleh para Parpol dan Kandidat hanya kepopuleran wajah dan nama. Tetapi kebijakan apa yang akan diambil dan apa *platform* parpolnya warga tidak mengetahuinya.

Sama seperti sebelum-sebelumnya, banyak faktor yang mempengaruhi pilihan dan keputusan seorang responden. Pada kasus di Kelurahan Tanjungpinang Kota ini, kesibukan dalam menjalankan usaha mereka sudah sangat menyita waktu, ditambah lagi untuk memberikan kritik kepada anggota calon legeslatif atau parpol akan semakin menguras waktu. Itulah sebabnya ada 98% responden menjawab tidak memantau kinerja dan tidak memberikan kritik setelah calon yang dipilih terpilih menjadi anggota legislatif.

Ketidaktertarikan warga untuk memberikan kontribusi termasuk memantau kinerja parpol tidak timbul begitu saja. perilaku parpol dan calon anggota legeslatif yang memperlakukan warga hanya sekedar pendulang suara pada saat pemilihan umum berimbas juga pada keterlibatan warga pada proses pengambilan kebijakan. Pada penelitian di lapangan penulis banyak mendapati responden yang mengatakan bahwa para kandidat tidak pernah datang ke pemukiman mereka baik hanya sekedar perkenalan diri mau pun pengenalan kebijakan. Kebanyakan dari para kandidat hanya mengutus tim sukses dan kalender-kalender yang menampilkan wajah para pejabat parpol dan keluarganya mau pun memajang foto para calon anggota legeslatif yang akan bertarung. Tidak ada dalam baliho-baliho atau pun kalender yang dibawa tim sukses tersebut menampilkan kebijakan-kebijakan dan *platform* partai.

Jawaban responden dari pertanyaan nomor 12 sebagaimana yang terlihat dalam tabel IV.7 di atas diketahui bahwa 2% atau 2 orang responden yang mengatakan akan selalu loyal, setia dan tidak akan berpindah pilihan dari partai politik dan calon legislatif yang dipilih dan ada sekitar 94 orang responden atau 98% mengatakan tidak akan loyal terhadap partai politik atau calon legislatif yang mereka pilih. Karena sebagian besar pemilih etnis Tionghoa di Kelurahan Tanjungpinang Kota bukan merupakan simpatisan salah satu partai politik mau pun calon legislatif sehingga mereka tidak mempunyai ikatan emosional terhadap suatu partai atau kontestan.

Dari tabel di atas, penulis menganalisa apakah masyarakat etnis Tionghoa yang berada di Kelurahan Tanjungpinang Kota termasuk dalam tipologi pemilih yang kritis atau tidak. Dengan pengukuran sebagai berikut:

$$= \frac{\text{jumlah jawaban (ya)}}{96 \times 4} \times 100\%$$

$$= \frac{8}{384} \times 100\%$$

= 2%

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh hasil yaitu sebesar 2% dan berdasarkan standard pengukuran yang telah ditetapkan jika hasil perhitungan berjumlah 51% sampai dengan 100%, maka dapat dikategorikan sebagai pemilih dengan tipologi pemilih kritis, dan jika hasil perhitungan 0 sampai dengan 50% maka dapat dikategorikan sebagai tipologi pemilih yang tidak kritis. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemilih etnis Tionghoa di Kelurahan Tanjungpinang Kota tidak termasuk ke dalam tipologi pemilih kritis.

4.4. Pemilih rasional

Pemilih ini memiliki oerientasi tinggi pada *policy-problem-solving* dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini mengutamakan kemampuan partai politik atau calon kontestan dalam program kerjanya.

Adapun indikator-indikatornya sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang Kinerja masa lalu parpol atau caleg
- b. Reputasi parpol atau caleg
- c. Pengetahuan tentang visi, misi, dan program kerja parpol atau caleg
- d. Loyalitas terhadap parpol atau caleg (cenderung berpindah jika kecewa)

Tabel IV.8
Persentase tingkat Rasional masyarakat etnis Tionghoa Kelurahan Tanjungpinang Kota

No	Pertanyaan	Jawaban		Jumlah	Persentase (%)
		Ya	Tidak		
13	Apakah anda mengetahui bagaimana kinerja masa lalu parpol atau caleg yang anda pilih ?	12	84	96	13
14	Apakah anda memilih caleg dan parpol karena memiliki reputasi/citra yang baik pada masa lalu ?	12	84	96	13
15	Apakah anda mengetahui visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan oleh parpol atau caleg yang anda pilih ?	13	83	96	14
16	Apakah anda akan merubah pilihan	23	73	96	24

anda pada caleg atau parpol lain jika parpol atau caleg yang anda pilih tidak mampu menunjukkan kinerja seperti yang anda harapkan ?				
Jumlah	60	324	384	64

Data: kuesioner

Mayoritas pemilih tidak mengetahui latar belakang dari calon serta tidak mempunyai keinginan untuk mencari tahu latar belakang dari calon tersebut. Hal ini dikarenakan bentuk pesimis dari pemilih, adanya paradigma pemilih bahwa siapa pun yang menjadi wakil mereka di parlemen tidak akan membawa perubahan yang baik. Daripada mereka terkesan golput, lebih baik mereka menggunakan hak pilih dan memilih kontestan cenderung ke etnis yang sama. Hal ini terlihat dari hasil kuesioner yang penulis sebarakan sebanyak 84 orang dari 96 responden yang menjawab tidak mengetahui latar belakang dari calon legislatif tersebut, dan hanya 12 orang atau 13% yang mengetahui latar belakang dari calon karena mereka memiliki hubungan emosional dengan calon tersebut.

Bertolak belakang dengan karakteristik responden dimana ada sekitar 43% responden dengan rentang usia 41-60 tahun yang artinya responden tersebut sudah mengikuti Pemilihan Umum setidaknya 5 kali. Sementara responden yang lainnya ada sekitar 24% di atas usia 60 tahun yang artinya setidaknya sudah mengikuti 8 kali pemilihan umum jika pemilihan umum dilakukan setidaknya 5 tahun sekali.

Responden dengan rentang umur tersebut penulis beranggapan bahwa setidaknya responden sudah mengetahui latar belakang partai pengusung kandidat yang akan mereka pilih. Tetapi pada faktanya dalam penelitian di lapangan dan juga melalui kuisisioner yang dibagikan kepada para responden didapati bahwa hanya 12 orang atau sekitar 13% yang mengetahui latar belakang partai, dan sisanya ada sekitar 84 orang yang tidak mengetahui latar belakang parpol pengusung kandidat.

Ketidaktahuan tersebut dapat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah kesibukan yang sangat menyita waktu sehingga tidak ada kesempatan untuk menganalisa dan

membaca berita terkait isu-isu politik yang menyangkut dengan kebijakan partai politik. Selain itu tingkat pendidikan para responden yang di dominasi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar juga mempengaruhi kualitas seseorang dalam menyerap informasi dan menganalisa peristiwa-peristiwa politik.

Sebanyak 84 orang pemilih tidak menetapkan pilihan berdasarkan reputasi calon di masa lalu, mereka tidak menjadikan reputasi sebagai pertimbangan dalam memberikan suara pada pemilihan legislatif tahun 2014. Adanya hubungan emosional dengan calonlah yang menjadi bahan pertimbangan. Kesibukan sehari-hari membuat mereka tidak banyak mengetahui perkembangan politik termasuk reputasi calon. Walaupun sebanyak 84 orang dari 96 kuesioner yang disebarkan tidak menjadikan reputasi calon sebagai pertimbangan dalam menetapkan pilihan, akan tetapi 12 orang sisa dari kuesioner tersebut berusaha mencari tahu apakah calon yang akan dipilih memiliki reputasi yang baik.

Jawaban pada pertanyaan nomor 14 didukung oleh jawaban pada pertanyaan nomor 13 bahwa responden yang memilih calon legislatif dan parpol karena memiliki reputasi yang baik pada masa lampau hanya sekitar 12% dan sisanya tidak memilih berdasarkan reputasi parpol dan kandidat pada masa lampau. Hal tersebut berkesesuaian dengan data pada pertanyaan nomor 13 dimana ada 84 orang responden yang tidak mengetahui reputasi dan latar belakang partai dan kandidat yang mereka pilih.

Ketidakikutsertaan dalam kegiatan politik seperti sosialisasi kampanye yang dilakukan oleh parpol maupun calon kandidat membuat 83 orang dari 96 kuesioner tersebut tidak mengetahui visi, misi dan program kerja calon kontestan yang mereka pilih. Pemilih beranggapan bahwa lebih baik menjalani kesibukan sehari-hari dari pada mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh parpol atau pun calon. Rasa keingintahuan terhadap visi, misi dan program kerja calon mendorong 13 orang dari 96 responden tersebut mengikuti kegiatan

kampanye yang dilakukan oleh calon, sehingga sebagian kecil responden tersebut mengetahui visi, misi dan program kerja calon pilihan mereka.

Sementara itu Persentase tingkat Rasional masyarakat etnis Tionghoa Kelurahan Tanjungpinang Kota mengenai loyalitasnya terhadap partai politik. Hal ini terlihat dari jawaban responden pada pertanyaan nomor 16 sebagaimana yang terlihat dalam tabel IV.8 di atas diketahui bahwa 24% atau 23 orang responden dari 96 jumlah keseluruhan responden mengatakan akan merubah pilihan pada calon legislatif atau partai politik lain pada pemilu berikutnya jika calon legislatif atau partai politik yang dipilih tidak mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik. Sedangkan 73 orang responden atau 77% mengatakan tidak akan merubah pilihan pada calon legislatif atau partai politik lain meski calon legislatif atau partai politik yang mereka pilih tidak dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik. Sebagaimana yang dijelaskan pada poin 16 ini. Kecendrungan dari pada masyarakat Kelurahan Tanjungpinang Kota tetap konsisten dari apa yang telah mereka pilih, dibandingkan dengan merubah pilihannya bilamana calon legislatif ini tidak mampu menunjukkan kinerjanya. Mereka sudah terbiasa dengan janji-janji yang dilontarkan oleh kontestan pada saat kampanye, sehingga mereka tidak lagi berharap.

Berdasarkan tabel di atas dapat juga dianalisa apakah masyarakat etnis Tionghoa yang berada di Kelurahan Tanjungpinang Kota termasuk dalam tipologi pemilih yang rasional atau tidak. Dengan pengukuran sebagai berikut:

$$= \frac{\text{jumlah jawaban (ya)}}{96 \times 4} \times 100\%$$

$$= \frac{60}{384} \times 100\%$$

$$= 16\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh hasil yaitu sebesar 16% dan berdasarkan standard pengukuran yang telah ditetapkan jika hasil perhitungan berjumlah 51% sampai dengan 100%, maka dapat dikategorikan sebagai pemilih dengan tipologi pemilih rasional, dan jika hasil perhitungan 0 sampai dengan 50% maka dapat dikategorikan sebagai tipologi pemilih yang tidak rasional. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemilih etnis Tionghoa di Kelurahan Tanjungpinang Kota tidak termasuk ke dalam tipologi pemilih rasional.

H. PENUTUP

1. Kesimpulan

Tipologi atau perilaku masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum (pemilihan legislatif) sangatlah penting karena akan menentukan siapa wakilnya yang akan terpilih menjadi anggota legislatif.

Pada penelitian tentang tipologi pemilih etnis Tionghoa pada Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang pada tahun 2014 (Studi kasus di Kelurahan Tanjungpinang Kota), penulis membagi tipologi pemilih etnis Tionghoa pada pemilihan legislatif tahun 2014 menjadi empat katagori atau empat dimensi yaitu: skeptis, tradisional, kritis, rasional beserta indikator-indikatornya kemudian dikembangkan menjadi 16 pertanyaan dalam bentuk kuesioner, berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari hasil kuesioner yang ditebarkan kepada responden dan dianalisis pada bab sebelumnya dengan persentase 57% tipologi pemilih Etnis Tionghoa di Kelurahan Tanjungpinang Kota pada pemilihan legislatif tahun 2014 “mendekati skeptis”.
2. Pada dimensi tradisional, dari hasil kuesioner yang ditebarkan kepada responden dan dianalisis pada bab sebelumnya yaitu 44.53% dengan pembulatan 45% terlihat bahwa

pemilih Etnis Tionghoa di Kelurahan Tanjungpinang Kota pada pemilihan legislatif Kota Tanjungpinang pada tahun 2014 “mendekati tidak tradisional”. Memang sebagian besar dari mereka menganggap kesamaan etnis/suku menjadi alasan dalam menentukan pilihan tetapi dari aspek-aspek yang lain seperti kesamaan keyakinan/agama bukanlah menjadi alasan dalam menentukan pilihan.

3. Selanjutnya pada dimensi kritis, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada responden dengan persentase 2% bahwa masyarakat Etnis Tionghoa di Kelurahan Tanjungpinang Kota pada pemilihan legislatif kota Tanjungpinang tahun 2014 “mendekati tidak kritis”, karena pemilih Etnis Tionghoa di Kelurahan Tanjungpinang Kota tidak mengetahui nilai-nilai ideologi yang dianut serta menentukan pilihan tidak melihat visi-misi dan program kerja yang ditawarkan oleh partai maupun calon legislatif yang mereka pilih.
4. Kemudian dari dimensi rasional, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada responden dengan persentase 16% bahwa masyarakat Etnis Tionghoa di Kelurahan Tanjungpinang Kota pada pemilihan legislatif Kota Tanjungpinang tahun 2014 “mendekati tidak rasional”. Dikarenakan sebagian besar dari mereka tidak mengetahui kinerja partai atau caleg di masa lalu dan tidak melihat reputasi partai atau pun caleg yang mereka pilih dan sebagian pula yang memilih tidak berdasarkan visi-misi kandidat.

Berdasarkan hasil pemaparan dan analisis tentang Tipologi Pemilih Etnis Tionghoa di Kelurahan Tanjungpinang Kota pada Pemilihan Umum Legislatif Kota Tanjungpinang tahun 2014, dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat Etnis Tionghoa di Kelurahan Tanjungpinang Kota dengan persentase 57% yang termasuk dalam katagori pemilih yang skeptis, yaitu pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan, juga tidak menjadikan kebijakan menjadi sesuatu yang

penting dalam menetapkan pilihan. Seperti epotesa peneliti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai fenomena dimana etnis Tionghoa cenderung memilih berdasarkan kedekatan etnis/suku memang benar adanya, hal itu terjawab dari jawaban masyarakat etnis Tionghoa dimana 51 orang dari 96 responden atau 53% menjawab mereka memilih kontestan berdasarkan kesamaan etnis/suku. Maka dari itu, dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat etnis Tionghoa dalam menentukan pilihannya lebih mementingkan ikatan '*ideology*' dan lebih menekan aspek-aspek subjektivitas seperti kedekatan nilai, budaya.

Hal ini dikarenakan mereka adalah golongan yang minoritas. Supaya aspirasi mereka dapat tersampaikan, mereka beranggapan dengan memilih kontestan dari etnis/suku yang sama maka aspirasi tersebut dapat tersampaikan. Tidak dipungkiri, paradigma lama mereka setiap berurusan dengan birokrasi selalu "dipersulit". Maka berdasarkan itu sebagian besar dari mereka cenderung menetapkan pilihan kepada kontestan yang memiliki kesamaan etnis/suku.

2. Saran

Negara demokratis yang memiliki keunggulan tersendiri. Karena dalam setiap pengambilan keputusan mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peran yang sangat penting. Salah satu dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik di pemerintah pusat maupun daerah.

Pemilihan Umum baik PILEG maupun PILKADA peran serta keikutsertaan masyarakat sangat penting, karena sukses tidaknya pelaksanaan PEMILU salah satunya adalah ditentukan bagaimana partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu tersebut. Oleh karena itu diharapkan kepada masyarakat di Kelurahan Tanjungpinang Kota khususnya etnis Tionghoa dalam menentukan pilihan sebaiknya dapat memutuskan

pilihannya berdasarkan independensi sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak lain dan lebih proaktif dalam memahami program-program atau kebijakan-kebijakan yang ditawarkan oleh kandidat dalam konsep untuk kepentingan bersama dan pemilih etnis Tionghoa dalam menentukan pilihan sebaiknya tidak hanya berdasarkan kesamaan budaya, etnis dan Politis-Ideologis melainkan juga harus berdasarkan penilaian terhadap tingkat kecakapan dan kualitas serta program atau kebijakan yang ditawarkan kandidat untuk kepentingan masyarakat luas.

Menjadi tanggung jawab bersama untuk memberikan kepercayaan bagi masyarakat, karena pemilihan umum dianggap sebagai salah satu pilar bagi berjalannya sebuah sistem demokrasi. Legitimasi sebuah sistem demokrasi membutuhkan ritual pemilihan umum yang bersih dan berwibawa. Akan timbul sebuah persoalan nasional ketika struktur pemilih didominasi oleh jenis pemilih skeptis. Ketika terdapat banyak pemilih skeptis, meningkat pula keengganan pemilih untuk memberikan suaranya dan yang terjadi adalah tingginya angka golput. Tingginya angka golput merupakan salah satu indikasi atas ketidakpercayaan masyarakat pada institusi-institusi politik di sebuah Negara.

Mereka pun beranggapan bahwa proses pemilihan umum yang akan memilih wakil-wakil mereka atau memilih presiden atau kepala daerah tidak akan bisa membawa ke perubahan yang berarti. Hal ini akan menjerami legitimasi hasil pemilihan umum dengan rendahnya angka partisipasi pemilih selama pemilu. Dengan demikian, pihak-pihak yang kalah bisa mengklaim bahwa hasil pemilu tidak representatif. Stabilitas nasional (politik, ekonomi, dan sosial budaya) bisa terganggu. Jadi adalah suatu kepentingan bersama (Negara, LSM, partai politik, dan lembaga penyelenggara pemilu) bila bisa mengurangi jumlah pemilih yang skeptis. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui proses penegakan hukum yang benar, sehingga masyarakat melihat adanya sistem keadilan bagi semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Rahman H.I, 2007, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Abdullah, Rozali, 2007, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, *Mewujudkan Pemilu yang lebih berkualitas: Pemilu Legislatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amirudin dan A. Zaini Bisri, 2005, *Pilkada Langsung, Problem dan Prospek : Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada 2005*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam, 2002, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Bungin, Burhan, 2009, *Metedologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Kencana
- Cangara, Hafied, 2011, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta : Rajawali Pers
- Damsar, 2010, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- E. H. Susanto, 2009, *Komunikasi Politik dan Otonomi Daerah : Tinjauan terhadap Dinamika Politik dan Pembangunan*, Jakarta : Mitra Wacana Media
- Efriza, 2012, *Political Explorer : Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Bandung : Alfabeta
- Firmanzah, 2012, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, edisi revisi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- , 2011, *Mengelola Partai Politik – Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di*
- Firmanzah, *Era Demokrasi*, ed.2, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Kusnaedi, 2009, *Memenangkan Pemilu dengan Pemasaran Efektif*, Jakarta : Duta Media Tama
- Nursal, Adman, 2004, *Politik Marketing Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Puspoyo, Widjanarko, 2012, *Dari Soekarno Hingga Yudhoyono, Pemilu Indonesia 1955-2009*, Solo : PT Era Adicitra Intermedia

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta

Supriyanto, Didik, 2006, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, Jakarta : Perludem

Surbakti, Ramlan, 2010, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia

Umar, Husein, 2011, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta : Rajawali Pers

B. Jurnal dan Penelitian terdahulu :

Eka Purnawan, 2014, *Perilaku Pemilih Masyarakat di Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan dalam Pemilihan Kepala Daerah Gubernur tahun 2010*, FISP Universitas Maritim Raja Ali Haji

Ryan Anggria Pratama, 2014, *Budaya Politik Etnis Tionghoa di Kota Tanjungpinang*, FISP Universitas Maritim Raja Ali Haji

Edi Handoko, 2014, *Tipologi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012*, FISP Universitas Maritim Raja Ali Haji

Leo Agustino dan M. Agus Yusuf, 2009, *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih : Analisis Pemilihan Presiden 2009 di Indonesia*, Program Magister Ilmu Politik Universitas Nasional

Sudaryanti, 2008, *Analisis tentang perilaku pemilih pada pilkada tahun 2005 di Surakarta (Studi Deskriptif tentang perilaku PNS Pemerintah Kota Surakarta dalam pilkada tahun 2005 di Surakarta)*, FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta

Zamroni, 2007, *Pemetaan Tipologi Pemilih PPP Kabupaten Jepara ; Sebuah Strategi Pemenangan Pemilihan Umum*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

C. Sumber Internet, Instansi dan Dokumen :

- [http://Kantor Berita Antara Kepulauan Riau - Politik - Panwaslu Hanya Temukan Satu Kasus Pelanggaran_files/button.htm](http://Kantor_Berita_Antara_Kepulauan_Riau_-_Politik_-_Panwaslu_Hanya_Temukan_Satu_Kasus_Pelanggaran_files/button.htm), diunduh pada tanggal 14 Oktober 2013

-<http://tanjungpinangkota.bps.go.id/publikasi/110?title=Statistik-Daerah-Kota-Tanjungpinang-2013>, diunduh pada tanggal 15 maret 2015

-<http://tanjungpinangkota.bps.go.id/publikasi/122?title=Tanjungpinang-Dalam-Angka-2013>, diunduh pada tanggal 15 maret 2015

-<http://tanjungpinangkota.bps.go.id/publikasi/113?title=Statistik-Kecamatan-Tanjungpinang-Timur-2013>, diunduh pada tanggal 15 maret 2015

-<http://tanjungpinangkota.bps.go.id/publikasi/117?title=Kecamatan-Tanjungpinang-Timur-Dalam-Angka-2012>, di unduh pada tanggal 15 maret 2015

- KPU Kota Tanjungpinang
- Kantor Kelurahan Tanjungpinang Kota

D. Peraturan Perundang-undangan

- UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu
- UU Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah